

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Pemangku Kepentingan

Teori pemangku kepentingan mulai dikenal dalam banyak literatur setelah diterbitkan buku *Strategic Management: A Stakeholder Approach* karya Freeman (1984). Freeman memperkenalkan teori stakeholder yang mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai pihak-pihak, baik individu maupun kelompok, yang dapat memengaruhi ataupun terdampak oleh pencapaian tujuan perusahaan

Teori pemangku kepentingan mengungkapkan bahwa hubungan perusahaan tidak hanya berkaitan dengan pemegang saham saja. Melainkan juga memiliki keterkaitan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam menjalankan kegiatan pada sebuah perusahaan. Pada pendekatan keberhasilan suatu perusahaan tidak semata-mata diukur dari aspek keuangan saja, juga dari dampak yang akan ditimbulkan dari hubungan dengan pihak tertentu. Berdasarkan teori pemangku kepentingan, semua yang termasuk pemangku kepentingan mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan termasuk pemerintah yang ada didalamnya (Ramadhan, 2020). Para pemangku kepentingan yang dimaksud terdiri dari pemegang saham, karyawan, kreditor, pemasok, bank, pemerintah, pelanggan, komunitas, serta masyarakat.

Teori pemangku kepentingan menyoroti perlunya melayani semua pemangku kepentingan terlepas dari besarnya kepentingan hukum mereka dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan pemangku kepentingan lebih baik dari proses maupun hasilnya (Gilbert & Rasche, 2020)

Pemangku kepentingan terbagi menjadi dua, pemangku kepentingan internal dan eksternal. Pemangku kepentingan internal meliputi karyawan, manajemen, pemilik perusahaan, dewan direksi, tim manajerial, serta pemegang saham. Sementara itu, pemangku kepentingan eksternal mencakup pemerintah dan masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas dan keputusan perusahaan. Teori pemangku kepentingan memberikan berbagai manfaat dalam pengelolaan perusahaan, salah satunya adalah terciptanya citra positif perusahaan. Berdasarkan teori ini, reputasi yang baik dapat diperoleh melalui pembentukan citra yang positif, yang tercermin dari interaksi antara pemangku kepentingan dengan masyarakat luas (Gilbert & Rasche, 2020).

Dalam konteks ini, pemangku kepentingan dapat berperan dalam membangun reputasi perusahaan, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan yang mengedepankan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan (Gilbert & Rasche, 2020). Kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat reputasi dan persepsi positif perusahaan di mata pemangku kepentingan lainnya maupun masyarakat luas. Hubungan antara pemangku kepentingan dan tanggung jawab sosial, mencerminkan bagaimana perusahaan memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Melalui tanggung jawab sosial, perusahaan berupaya memberikan manfaat kepada berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, karyawan, pelanggan, serta lingkungan. Pelaksanaan kegiatan CSR dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan diantaranya memperbaiki reputasi, loyalitas pelanggan, kepercayaan, serta daya tarik bagi mitra bisnis (Justin et al., 2025).

Pemerintah merupakan salah satu stakeholder yang memiliki tugas penting dalam menjaga stabilitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan lingkungan guna memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Apabila suatu perusahaan memiliki koneksi politik yang kuat, maka ketergantungan perusahaan terhadap dukungan pemerintah cenderung meningkat. Koneksi politik tersebut dapat dimanfaatkan untuk melindungi perusahaan dari risiko deteksi atas praktik perpajakan agresif (Kim & Zhang, 2021). Penyalahgunaan koneksi politik menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak dapat terjadi melalui keterkaitan antara pelaku bisnis dengan aparat pemerintah. Oleh karena itu, koneksi politik menjadi fokus penelitian yang menarik, mengingat berbagai kasus penghindaran pajak banyak terjadi pada perusahaan yang memiliki keterikatan kuat dengan pemerintah atau partai politik di Indonesia.

Teori pemangku kepentingan memiliki tiga pendekatan utama yang saling berkaitan, yaitu deskriptif, instrumental, dan normatif. Pendekatan deskriptif menjelaskan hubungan antara pemangku kepentingan di masa lalu,

masa kini, dan masa mendatang dengan hasil yang diharapkan. Pendekatan normatif menekankan pada prinsip moral dan filosofis dalam menganalisis aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan etika. Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap keputusan yang diambil. Konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab sosial diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan (Ardina, 2023).

Berdasarkan teori pemangku kepentingan, keberhasilan perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan dari berbagai pihak, seperti karyawan, pemerintah, pelanggan, pemegang saham, dan lingkungan, baik dari aspek hukum, ekonomi, maupun etika (Rashid *et al.* 2022). Teori ini juga menekankan bahwa organisasi harus berupaya melindungi kepentingan seluruh melalui perilaku yang etis, karena hal tersebut akan berimplikasi pada keberlanjutan perusahaan masa mendatang. Dengan demikian, manajemen perusahaan yang efektif perlu meningkatkan kontribusi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial (Tang & Yang, 2020).

Keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang memerlukan pendekatan manajemen yang terbuka terhadap kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan tersebut dapat diwujudkan melalui komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait. Oleh karena itu, manajemen perlu menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam membangun serta mempertahankan hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang transparan dan

berkualitas (Koh et al., 2023). Teori pemangku kepentingan juga dipandang sebagai pendekatan manajemen strategis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip etika perusahaan.

Tata kelola perusahaan yang baik mampu memberikan dampak positif bagi pemegang saham, pemangku kepentingan, serta masyarakat luas, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait pengeluaran untuk tanggung jawab sosial dan kewajiban perpajakan (Rashid *et al.*, 2022). Konflik kepentingan dapat semakin meningkat ketika dewan direksi memiliki koneksi politik dan berupaya memaksimalkan keuntungan melalui pengendalian keputusan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan praktik penghindaran pajak (Rashid & Hossain, 2022).

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Telah banyak penelitian yang dilakukan terkait tanggung jawab sosial perusahaan, penghindaran pajak, serta pengaruh koneksi politik dalam suatu perusahaan. Ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak masih menjadi fenomena umum yang terjadi di lingkungan perusahaan. Namun demikian, hasil dari berbagai penelitian sebelumnya tidak selalu menunjukkan kesimpulan yang konsisten, sehingga terdapat perbedaan temuan yang menimbulkan adanya *research gap*.

Rashid *et al.*, (2022) dalam penelitiannya berpendapat semakin besar pengeluaran perusahaan untuk kegiatan tanggung jawab sosial, maka tingkat penghindaran pajak cenderung semakin rendah. Sebaliknya, keberadaan koneksi politik sebagai variabel moderasi justru melemahkan pengaruh

tanggung jawab sosial terhadap praktik penghindaran pajak. Ini mengindikasikan bahwa keterhubungan dengan pihak politik dapat mendorong perusahaan menjadi kurang bertanggung jawab secara sosial. Ketika pihak yang memiliki keterkaitan politik memandang biaya tanggung jawab sosial sebagai beban yang dapat menurunkan kinerja perusahaan, maka pemangku kepentingan akan menilai bahwa perusahaan tersebut kurang menunjukkan tanggung jawab sosial. Selain itu, konsumen yang sangat peduli terhadap kondisi sosial cenderung memilih menggunakan produk perbankan dari perusahaan yang lebih bertanggung jawab secara sosial, meskipun dengan biaya yang lebih tinggi, yaitu perusahaan yang lebih sedikit melakukan penghindaran pajak dan lebih banyak berinvestasi dalam kegiatan tanggung sosial.

Teori tersebut didukung oleh Warsono & Ardianto (2015) dalam penelitian yang berjudul *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan insentif pajak sebagai variabel moderasi. Sejalan dengan penelitian sebelumnya tentang keterkaitan dengan tanggung jawab sosial, dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa tanggung jawab sosial memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang semakin tinggi menunjukkan bahwa perusahaan cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Hal ini khususnya terlihat pada perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah. CSR sendiri dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan dari

aktivitas ekonomi perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, adelfattah & Aboud (2020) memiliki pendapat lain terkait dengan tanggung jawab sosial dan praktik penghindaran pajak. Dalam penelitiannya tentang penghindaran pajak, tata kelola perusahaan, dan tanggung jawab sosial perusahaan pada kasus pasar modal mesir. Hasil penelitian ini adalah semakin tinggi kemungkinan perusahaan yang terlibat kegiatan penghindaran pajak, maka akan semakin tinggi kemungkinan perusahaan yang melakukan kegiatan penghindaran pajak, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Dalam penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen dan tata kelola perusahaan serta pengungkapan csr sebagai variabel independen.

Pada penelitian ini menunjukan bahwa perilaku sebuah perusahaan belum selaras dengan tingkat pengeluaran tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Dengan kata lain, perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak cenderung lebih meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial untuk mengurangi potensi kekhawatiran publik. Abid & Dampak (2022) melakukan penelitian dengan judul '*Corporate Social Responsibility And Tax Avoidance: The Case Of French Companies*'. Dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi dan membuktikan kebenaran pendekatan estimasi penelitian diuji dengan menggunakan analisis multivariabel. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja tanggung jawab sosial, variabel independen yang digunakan adalah penghindaran

pajak, serta variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kualitas audit. Hasil dari penelitian ini digunakan guna mengetahui apakah kualitas audit memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, apabila dipraktikan oleh perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan dengan nilai tanggung jawab secara sosial yang tinggi adalah Perusahaan yang memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif. Dalam penelitian ini menyebutkan banyak perusahaan yang diaudit oleh auditor berkualitas tinggi cenderung terlibat dalam praktik tanggung jawab sosial untuk melindungi nilai terhadap konsekuensi agresif. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan kegiatan tanggung jawab sosial sebagai kewajiban moral, namun lebih cenderung memaksimalkan hal tersebut untuk tujuan kekayaan dan melegitimasi operasi dalam sebuah perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab.

Pada sektor politik Kim & Zhang (2021) melakukan penelitian dengan judul '*Corporate political connections and tax aggressiveness*' dalam penelitian ini variabel dependennya adalah agresivitas pajak, variabel independennya adalah koneksi politik. Dari penelitian ini didapatkan bukti bahwa perusahaan yang terlibat secara politik lebih aktif dalam praktik *tax avoidance* karena meliputi beberapa karakteristik, termasuk risiko yang lebih rendah, pengetahuan yang lebih baik tentang perubahan peraturan perpajakan di masa mendatang, biaya politik yang lebih rendah dan kedekatan dengan pembuat kebijakan. Koneksi politik dinilai dapat membantu perusahaan

untuk mendapatkan akses terhadap anggota dewan. Akses ini yang nantinya akan menghubungkan perusahaan dengan informasi rahasia mengenai perubahan undang-undang dimasa yang akan datang atau sumber daya pemerintah yang akan dialokasikan untuk penegakan pajak.

Penelitian Kim & Zhang (2021) sejalan dengan penelitian Carney et al., (2022) menyebutkan ketika perusahaan yang memiliki hubungan secara politik dilihat lebih memiliki banyak keuntungan, keuntungan tersebut didapat dari hubungan politik yang terjalin. Namun hasil kedua penelitian tersebut hasilnya berbanding terbalik dengan penelitian Hijriani *et al.*, (2022) yang mengatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dengan proksi *GAAP Effective Tax Rate* (ETR). Perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak jarang akan dikenai sanksi atas hukuman dari pemerintah, hal ini dikarenakan perusahaan mencoba meminimalkan beban pajak dengan cara yang legal serta tidak melanggar peraturan perpajakan. Keinginan wajib pajak untuk membayar pajak dengan beban lebih rendah merupakan sifat alamiah manusia. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah ketika proses pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha agar terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Ringkasan terkait dengan penelitian terdahulu tentang penghindaran pajak, tanggung jawab sosial, dan koneksi politik dapat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Md. Harun Ur Rashid, Farhana Begum, Syed Zaid Hossain, Jamaliah Said (2022)	<i>Does CSR Affect Tax Avoidance? Moderating Role Of Political Connections in Bangladesh Banking Sector</i>	Variabel dependen: Penghindaran pajak. Variabel Independen: Tanggung Jawab sosial Variabel Moderasi: Koneksi Politik	Semakin tinggi pengeluaran tanggung jawab sosial perusahaan, maka akan semakin rendah penghindaran pajak. Sebaiknya efek moderasi dari koneksi politik melemahkan peran tanggung jawab sosial dalam penghindaran pajak yang menyiratkan bahwa hubungan politik membuat perusahaan tidak bertanggung jawab secara sosial. Koneksi politik yang kuat cenderung menjadi agresif terhadap pajak dengan melemahkan peran dari tanggung jawab sosial.
2.	Abdelfattahh & Abound A (2020)	<i>Tax Avoidance Corporate Governance, And Corporate Social Responsibility: The Case of The Egyptian</i>	Variabel dependen: penghindaran pajak. Variabel Independen: Tata kelola perusahaan, pengungkapan	Semakin tinggi tingkat penghindaran pajak, semakin tinggi pula tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial, perilaku sebuah perusahaan belum tentu selaras dengan tingkat

		<i>And Capital Market</i>	tanggung jawab sosial.	pengeluaran tanggung jawab sosial-nya.
3.	Souhir Abdi & Saida Dammak (2024)	<i>Corporate Social Responsibility And Tax Avoidance: The Case Of French Companies</i>	Variabel dependen: kinerja tanggung jawab sosial. Variabel independen: penghindaran pajak. Variabel moderasi: kualitas audit	Perusahaan dengan nilai tanggung jawab sosial yang tinggi adalah perusahaan yang lebih mungkin untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa lebih banyak perusahaan yang diaudit oleh auditor berkualitas tinggi cenderung terlibat dalam praktik tanggung jawab sosial untuk melindungi nilai perusahaan terhadap konsekuensi agresif.
4.	Warsono & Yuli Ardianto (2023)	<i>Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Insentif Pajak sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia)</i>	Variabel dependen: Agresivitas Pajak. Variabel Independen: Tanggung jawab sosial. Variabel Moderasi: Insentif Pajak	Tanggung jawab sosial memberikan pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak. Terutama pada perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah.

5.	Chansong (Fransis) Kim & Liandong Zhang (2021)	<i>Corporate Political Connections and tax aggressiveness</i>	Variabel dependen: agresivitas pajak. Variabel independen: Koneksi politik	Perusahaan yang terlibat secara politik lebih aktif dalam praktik penghindaran pajak karena memiliki beberapa karakteristik yang mempermudah dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Karakteristik tersebut meliputi: risiko ketahuan yang lebih rendah, pengetahuan yang lebih baik tentang perubahan peraturan perpajakan yang akan mendatang, biaya politik yang lebih rendah, serta memiliki kedekatan dengan pembuat kebijakan.
6.	Michael Carney, Saul Estrin, Zhi Xiang Liang, Daniel Shapira (2022)	National Institution system, foreign ownership and firm performance: the case of understudied	Variabel dependen: Produktivitas tenaga kerja persentase penjualan yang diekspor. Variabel independen: umur perusahaan, perusahaan GDP Perkapita, kepemilikan .	Perusahaan yang terhubung secara politik dilihat lebih memiliki banyak keuntungan, keuntungan tersebut didapat dari hubungan politik yang terjalin.

7.	Anisa Nadia Hijriani, Sri Wahjuni, Setu Setyawan (2022)	Pengaruh Koneksi Politik, Dewan Komisaris, Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia).	Variabel dependen: penghindaran pajak. Variabel independen: koneksi politik, jumlah rapat dewan komisaris, tingkat kehadiran anggota dewan komisaris dalam rapat, ROA, LEV, Ukuran Perusahaan	Variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Baik melalui GAAP ETR maupun Current ETR. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tidak akan dikenakan sanksi atas hukuman dari pemerintah karena perusahaan berusaha mengurangi beban pajak dengan cara legal dan tidak melanggar Undang Undang yang berlaku.
----	---	---	--	--

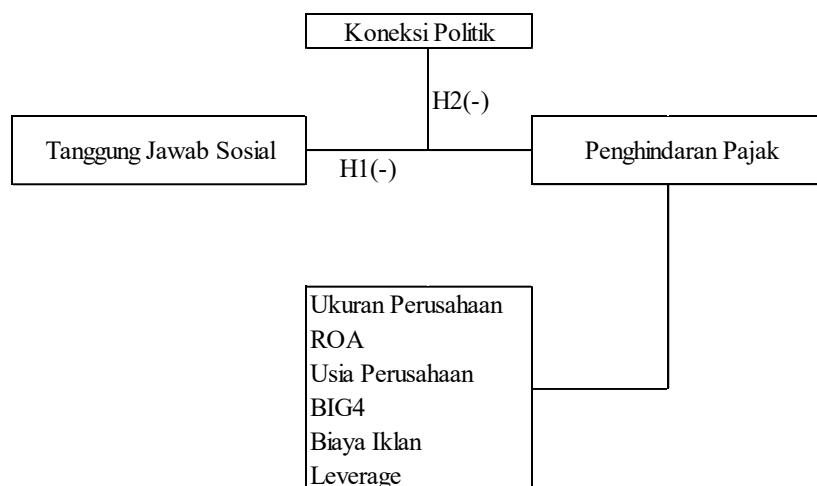
(Sumber : diolah dari berbagai referensi)

2.2 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen (Y) yaitu penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Book Tax Differences* (BTD), variabel independen (X) yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta variabel moderasi (Z) yaitu koneksi politik (Political Board Member/PBM). Selain itu penelitian ini menggunakan lima variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan (SIZE), *Leverage* (LEV), Profitabilitas (ROA), Usia perusahaan (AGE), dan kualitas audit (BIG 4).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, CSR dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Selanjutnya, koneksi politik juga berperan sebagai variabel moderasi yang dapat mengubah kekuatan hubungan antara CSR dan penghindaran pajak. Agar diperoleh hasil yang lebih valid, penelitian ini juga memasukan variabel kontrol yang diperkirakan untuk memengaruhi praktik penghindaran pajak. Kerangka pemikiran disajikan pada gambar 2.1

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah disusun dengan kalimat tanya, sedangkan hipotesis dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan kerangka penelitian pada gambar 2.1, hipotesis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

2.3.1 Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan wajib memenuhi tanggung jawabnya kepada seluruh pemangku kepentingan yang memiliki beragam kepentingan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemerintah adalah dengan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya pajak yang disetorkan kepada pemerintah dikelola dengan baik agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari pajak tersebut (Rahmawati et al., 2025). Oleh karena itu, perusahaan akan membayar pajak apabila perusahaan menilai bahwa pajak yang telah mereka berikan dimanfaatkan oleh pemerintah tidak hanya untuk kelompok tertentu saja, tetapi dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun kondisi ini dapat berlaku sebaliknya apabila perusahaan merasa bahwa ketika melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah, pajak tersebut tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, seperti tidak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka perusahaan akan beranggapan bahwa baik melakukan penghindaran pajak dan dana yang sebelumnya dialokasikan untuk membayar pajak dialihkan menjadi cadangan untuk tanggung jawab sosial perusahaan, dengan tujuan membangun citra positif perusahaan di mata masyarakat.

Banyak penelitian mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan memiliki kaitan dengan penghindaran pajak. Menurut Alasaadi (2020) perusahaan yang berkontribusi dengan menggunakan tanggung jawab sosial guna menutupi perilaku negatif perusahaan dan tidak bertanggung

jawab secara sosial dengan melakukan penghindaran pajak secara agresif. Hal ini berlaku sebaliknya, menurut Rasid *et.al.*, (2022) menegaskan apabila perusahaan dengan skor tanggung jawab sosial yang lebih tinggi dianggap melakukan lebih sedikit penghindaran pajak pada negara negara dengan tata kelola yang buruk.

Pernyataan tersebut didukung oleh teori pemangku kepentingan dimana dalam teori pemangku kepentingan citra baik para pemangku kepentingan dianggap sebagai gambaran dari sebuah perusahaan (Rashid *et al.*, 2022). Sehingga perusahaan berupaya untuk meningkatkan citra tersebut salah satu caranya dengan menggunakan praktik tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial dianggap memberikan dampak kepada masyarakat secara luas. Berdasarkan uraian yang disebutkan maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat hubungan negatif antara tanggung jawab sosial dengan penghindaran pajak.

2.3.2 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Hubungan Tanggung Jawab

Sosial Perusahaan dengan Penghindaran Pajak

Perusahaan yang terlibat aktif secara politik melakukan praktik penghindaran pajak karena terdapat beberapa hal yang mendukung untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hal tersebut merupakan karakteristik yang terdiri dari risiko yang lebih rendah, kedekatan dengan pembuat kebijakan, biaya politik yang rendah serta pengetahuan yang lebih baik tentang peraturan dimasa yang akan mendatang. (Kim & Zhang, 2021).

Hubungan politik dianggap sebagai bahaya utama dibalik praktik penghindaran pajak (Adams & Ferreira, 2022). Dengan adanya hubungan tersebut dianggap dapat menjadi penyelamat apabila terjadi permasalahan di masa yang akan datang. Perusahaan yang memiliki ikatan politik diduga menggunakan tanggung jawab sosial sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan pemerintah dan mengambil keuntungan dari hubungan kedekatan dengan pemerintah. Sehingga hal ini merubah motivasi pelaksana tanggung jawab sosial dan normatif menjadi motivasi strategis. Direksi mencoba memaksimalkan keuntungan mereka dengan mengendalikan pengambilan keputusan dewan mengenai tanggung jawab sosial dan pembayaran pajak (Rashid & Hosain, 2022).

Bisnis yang memiliki koneksi politik mungkin menggunakan pengaruh dan posisinya untuk mendapatkan penerimaan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki ikatan politik kemungkinan tidak hanya memandang tanggung jawab sebagai peningkatan legitimasi, melainkan memiliki peluang yang memungkinkan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Rashid *et al.*, 2022). Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: koneksi politik melemahkan dampak negatif tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak.